

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek yang tidak dapat dipandang sebelah mata dalam proses pembangunan. Alasannya, pendidikan diyakini menjadi komponen strategis dan mendasar guna mendukung dan mendorong setiap upaya pembangunan sektor lainnya. Pendidikan juga mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi, peradaban dan proses transformasi suatu bangsa. Pendidikan yang didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Kebijakan Pendidikan memerlukan visi dan misi yang memiliki relevansi dengan keadaan dan tuntutan zamannya, karena setiap perubahan zaman akan mempengaruhi pula orientasi kebijakan pendidikan, baik pada tataran teoritis maupun praktis. Seperti yang diamanatkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) menyatakan “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan Ayat (2) “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Amanat konstitusi ini diperkuat lagi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 34 Ayat (2) yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Makna yang terkandung dalam Undang-Undang diatas berimplikasi bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada setiap warganya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tidak menyelenggarakan pendidikan secara gratis dan berkualitas. Departemen Pendidikan Nasional, khususnya Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai pelaksana pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah mencanangkan kebijakan sekolah gratis.

Program tersebut diperuntukkan bagi sekolah guna membebaskan ataupun meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu.

Dalam kurun waktu tahun 2005–2009, wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang pendidikan adalah dengan melakukan upaya nyata secara terencana dan terukur dengan fokus pada tiga pilar pengembangan pendidikan, yaitu (1) peningkatan pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik (Renstra Depdiknas, 2004). Departemen Pendidikan Nasional sebagai pelaksana pendidikan dasar, menengah dan tinggi di Indonesia telah mencanangkan kebijakan pembangunan diantaranya, seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu memperluas akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan memberikan aspek yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat (Diknas, 2005:1).

Adanya kebijakan pemerintah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun yang merupakan program untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka meringankan beban orangtua siswa dalam membiayai pendidikan anak mereka, memerlukan dana yang besar. Apalagi target penuntasan Wajar Dikdas tersebut telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2008/2009 dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP seperti tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2006. Keterbatasan anggaran yang tersedia menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalokasikan dana pendidikan secara bertahap. Salah satu program tersebut adalah pemberian bantuan dana ke lembaga pendidikan formal ke lembaga pendidikan dasar untuk keperluan biaya operasional di lembaga pendidikan masing-masing yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Diknas, 2009:2).

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan APK tingkat SMP. Pada tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian/penuntasan program wajar 9 tahun tersebut (Diknas, 2009: 5). Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah akan melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar.

Faktor ketidakmampuan membiayai sekolah atau faktor ekonomi menjadi faktor penyebab yang paling dominan putus sekolah. Kenyataan itu dibuktikan dengan tingginya angka rakyat miskin di Indonesia yang anaknya tidak bersekolah atau putus sekolah karena tidak ada biaya. Pendidikan dan kemiskinan merupakan dua hal yang erat kaitannya. Konteks yang seringkali muncul dari kedua hal tersebut adalah masyarakat yang kehidupannya berada dalam garis kemiskinan acapkali tidak dapat mengenyam pendidikan. Oleh karena itu berbagai permasalahan yang sangat kompleks dalam bidang pendidikan muncul karena kemiskinan tersebut. Masih tingginya angka peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, atau masih ada masyarakat yang memang benar-benar tidak dapat menempuh pendidikan karena terbentur masalah biaya. Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Namun masih banyak orang miskin yang memiliki akses terbatas dalam memperoleh pendidikan bermutu antara lain karena mahalnya biaya pendidikan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2005) untuk kelompok 20% rumah tangga termiskin, misalnya persentase biaya pendidikan per anak mencapai 10% untuk peserta didik SD, 18,5% untuk peserta didik SMP dan 28,4% untuk peserta didik SMA ([www.demografi.bps.go.id](http://www.demografi.bps.go.id)) selain itu faktor kemiskinan merupakan salah satu penyebab angka putus sekolah tinggi, hal ini

dibuktikan dari Laporan Statistik Persekolahan Depdiknas tahun 2007/2008 sebanyak 470,512 atau 1,79% jumlah siswa SD di Indonesia yang drop out dan 332,824 atau 3,94% jumlah siswa SMP yang drop out, hal serupa diberitakan dalam media bahwa angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan di Indonesia empat tahun terakhir (tahun 2005-2009) masih di atas satu juta siswa per tahun.

Untuk dapat memberikan aksesibilitas keadilan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi kelompok miskin guna mendukung keberhasilan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai kebutuhan dasar setiap anak, dan upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan, maka pemerintah melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS mulai digulirkan ke Propinsi sejak bulan Agustus 2005. Program BOS tersebut diperuntukkan bagi sekolah guna membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: (1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta; (2) Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI); (3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta (Diknas, 2009:4).

Tujuan program BOS, seperti tercantum dalam buku panduan yang diterbitkan oleh Depdiknas Ditjen Mandikdasmen, yang pada awalnya untuk meringankan beban masyarakat dalam biaya pendidikan khususnya jenjang pendidikan dasar menjadi rancu pada saat pemerintah mencanangkan program sekolah gratis. Asumsi masyarakat bergeser pada pengertian bahwa dana BOS

yang telah digulirkan pemerintah sebelum sekolah gratis didengungkan, ditujukan untuk menggratiskan sekolah, padahal dana BOS secara resmi hanya diperuntukkan untuk meringankan beban biaya peserta didik. Untuk dapat menggratiskan sekolah, dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah pusat harus didampingi oleh dana pemerintah daerah yang telah dianggarkan (Puslitjaknov Depdiknas: 2009).

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: (1) SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun; (2) SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun; (3) SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun; (4) SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten: Rp 570.000,-/siswa/tahun (Diknas, 2009:4).

Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20 persen sebagai amanat Undang-undang Dasar, secara eksplisit pelaksanaan pendidikan tidak lagi hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tetapi juga sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, baik dalam konteks pengelolaan maupun dalam konteks pengawasan pendidikan. BOS tidak sepenuhnya membebaskan peserta didik dari biaya sekolah. Ada komponen biaya yang tetap dibebankan pada sekolah, BOS hanya bersifat sebagai pendamping dana yang berasal dari pemerintah daerah. Implikasi yang diharapkan dari hal tersebut adalah bagaimana dana pemerintah daerah dapat mendampingi dana pemerintah pusat. Dengan kata lain, apakah berjalan atau tidak penerapan program dana BOS secara efektif tergantung pada kesiapan masing-masing pemerintah daerah. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian dana

BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia dan biaya investasi.

Menurut buku panduan program BOS yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009, dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) pembiayaan seluruh kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB); (2) pembelian buku teks pelajaran dan buku penunjang untuk koleksi perpustakaan; (3) pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah; (4) pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remedial, program pengayaan siswa, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya; (5) pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa; (6) pengembangan profesi guru antara lain pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS; (7) pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair dan perawatan lainnya; (8) pembiayaan langganan daya dan jasa; (9) pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah; (10) pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin; (11) pembiayaan pengelolaan BOS dan bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan jika masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran sekolah.

Mengacu dari panduan tersebut di atas, penulis menemukan sejumlah fakta tentang pemanfaatan dana BOS di wilayah Kecamatan Pesanggrahan yang tidak sesuai dengan peruntukan resminya. Beberapa diantaranya adalah kasus di sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dimana dana BOS digunakan untuk gaji guru ataupun tenaga administrasi kontrak/bantu mengambil porsi yang sangat besar, hal ini disebabkan karena sekolah tersebut adalah sekolah penerima dana BOS dan dilarang untuk memungut sumbangan/iuran sukarela dari orang tua siswa, padahal selama ini sekolah bergantung pada sumbangan/iuran dimaksud untuk membayar gaji guru ataupun tenaga administrasi kontrak/bantu. Komite sekolah yang diharapkan sebagai mediator antara sekolah dengan orang tua siswa tidak dapat berbuat banyak karena walaupun ada sumbangan/iuran yang diterima

sekolah dari orang tua siswa, mereka menuntut sumbangan/iuran sukarela tersebut lebih dipergunakan untuk pemanfaatan kegiatan yang menunjang proses belajar mengajar siswa (seperti pembelian sejumlah unit komputer) juga mereka menuntut transparansi atas sumbangan/iuran sukarela yang telah mereka keluarkan. Tidak dapat disalahkan jika orang tua siswa berasumsi bahwa sekolah telah mampu membiayai gaji guru atau tenaga honorer karena sekolah telah menerima dana BOS. Implikasi dari kejadian tersebut adalah pada waktu Penerimaan Siswa Baru (PSB) sekolah memungut biaya pendaftaran yang jumlahnya besar kepada orang tua siswa baru. Meskipun BOS dapat dipergunakan untuk membayar gaji guru dan pegawai honor, seharusnya hal itu juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pesanggrahan).

Penyalahgunaan lain yang terjadi adalah banyaknya dana BOS yang dimasukkan ke rekening pribadi kepala sekolah. Padahal, dana BOS diwajibkan untuk masuk ke rekening sekolah atau adanya kegiatan peningkatan kompetensi guru-guru melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), tetapi diklat itu sendiri tidak diselenggarakan, ironisnya pembagian uang kepada guru-guru tetap dilakukan dengan mengatasnamakan uang Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan pelatihan (diklat) Kasus penyalahgunaan yang sering terjadi selain yang disebutkan sebelumnya adalah dana BOS yang telah digulirkan digunakan untuk merehabilitasi gedung sekolah. Program BOS yang berjalan tidak efektif pada Kecamatan Pesanggrahan dapat dilihat pada data laporan pos penggunaan dana BOS, dimana biaya untuk pembelian buku teks pelajaran sangat minim alokasinya dibandingkan dengan biaya sarana prasarana dan ekstrakurikuler:

Tabel 1  
Rekap Penggunaan Dana BOS/3 Bulan

No	Keterangan	Nilai
1	Honor Guru Tidak Tetap/tahun**	Rp 1.344.000,00
2	Honor Guru Tidak Tetap**	Rp 3.000.000,00
3	MGMP/Penataran	Rp 4.000.000,00
4	Musker MKKS	Rp 1.379.200,00
5	Belanja Barang dan Jasa	Rp 7.100.000,00
6	KBM	Rp 5.365.000,00
7	Pengadaan KBM (ATK)	Rp 10.000.000,00

8	Kegiatan Penilaian UUB	RP 33.395.800,00
9	Pengadaan **	Rp 6.000.000,00
10	Kesiswaan	Rp 18.788.000,00
11	Biaya Transportasi (40 Siswa)	Rp 3.000.000,00
12	Biaya Pemeliharaan	Rp 957.000,00
13	Biaya Pelaporan	Rp 600.000,00
14	Biaya Penyusunan Laporan	Rp 600.000,00
Jumlah		Rp 102.542.000,00

Catatan: \*\*tidak jelas

Sumber: Rekap laporan Dikdas Pesanggrahan

Alokasi dana BOS untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sebesar RP. 5.365.000,00 merupakan jumlah yang minim bagi satu sekolah dengan perkiraan jumlah siswa sebanyak 316 siswa, dengan peruntukkan belanja buku teks pelajaran, Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai penunjang buku teks pelajaran menyebabkan sekolah tidak memiliki pilihan selain membeli buku teks pelajaran dan LKS yang kualitasnya minim.

Program BOS merupakan program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan, namun kenyataannya dilapangan Program BOS bukan hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif dimana ditemukanya kasus-kasus yang terjadi disekolah-sekolah, baik mengenai permasalahan atau kendala yang dihadapi sekolah, upaya sekolah untuk dapat mengelola dana bos tersebut walaupun dengan dana yang terbatas, usaha sekolah untuk membebaskan biaya untuk siswa miskin.

Indikasi-indikasi tersebut mendorong perlu dilakukannya evaluasi efektivitas pemanfaatan dana BOS. Penilaian efektivitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauhmana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan. Evaluasi program dinilai tidak hanya dari keberhasilan program tersebut mencapai sasaran atau tujuan yang diembannya, melainkan juga diukur dari segi efisiensi pengelolaan program BOS. Sejalan dengan peningkatan kuantitas program, sebagai wujud dari hasil yang dicapai program (*output*), akan ada perubahan-perubahan pada kelompok sasaran yang mengiringinya. Meningkatnya mutu pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu perwujudan manfaat dari program BOS. Akan tetapi, jika ternyata

setelah ada program BOS, mutu pendidikan tidak lebih baik dari sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa program BOS tersebut tidak efektif.

Lokasi penelitian ini dipusatkan di wilayah Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pesanggrahan. Propinsi DKI Jakarta dipilih karena merupakan salah satu Propinsi yang memiliki PAD tinggi, data terakhir yang dilansir oleh Pemerintah DKI Jakarta menyebutkan PAD untuk tahun 2009 adalah sebesar 11, 434 triliun rupiah ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Lebih spesifik, Kotamadya Jakarta Selatan merupakan Kotamadya dengan alokasi dana BOS tertinggi kedua setelah Jakarta Timur, yaitu sebesar 194,413 miliar rupiah per triwulan (Hasil Workshop BOS Depdiknas, 2009).

Tabel 2  
Jumlah Dana BOS  
Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2009

NO	KABUPATEN/ KOTA ADMINISTRASI	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH SISWA							UMUR 7 – 12
			1	2	3	4	5	6	TOTAL	
1	Kabupaten Kep. Seribu	14	522	493	504	448	435	412	<b>2,814</b>	2,766
2	Jakarta Pusat	394	16376	15516	15264	14744	13627	12707	<b>88,234</b>	82,485
3	Jakarta Utara	409	23884	22640	22343	22260	19460	18044	<b>128,631</b>	119,626
4	Jakarta Barat	665	34392	33131	33214	32742	29592	27768	<b>190,839</b>	130,117
5	Jakarta Selatan	686	34304	33576	33597	33244	30545	29147	<b>194,413</b>	189,884
6	Jakarta Timur	878	45012	44161	44228	43895	45169	44608	<b>267,073</b>	249,354
JUMLAH		3046	<b>154490</b>	<b>149517</b>	<b>149150</b>	<b>147333</b>	<b>138828</b>	<b>132686</b>	<b>872,004</b>	<b>774,232</b>

Sumber: Direktorat Pembinaan TK dan SD, Depdiknas

Kecamatan Pesanggrahan dijadikan sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik tersendiri, karakteristik yang dimaksud adalah kecamatan ini merupakan kecamatan yang belum lama berdiri yaitu pada tahun 1996, dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Kebayoran Lama. Selain itu, dalam penyaluran dana BOS di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pesanggrahan mendapat guliran dana BOS tertinggi dibanding kecamatan lainnya. Berdasarkan rekap yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Selatan sampai periode Bulan Desember 2009, dapat dilihat sebagai berikut:

Universitas Indonesia

Tabel 3  
Jumlah Dana BOS  
Kotamadya Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2009

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Dana
1.	Cilandak	91	29.293	3.346.237.500
2.	Kebayoran Lama	121	38.183	3.361.762.500
3.	Kebayoran Baru	77	20.163	2.345.562.500
4.	Mampang Prapatan	53	14.745	1.689.487.500
5.	Pasar Minggu	104	32.501	3.676.750.000
<b>6.</b>	<b>Pesanggrahan</b>	<b>85</b>	<b>35.255</b>	<b>3.927.125.000</b>
7.	Setiabudi	62	14.242	1.592.856.250
8.	Tebet	94	24.850	2.800.350.000
9.	Jagakarsa	115	41.585	3.745.756.250
10.	Pancoran	54	13.773	1.514.587.500

Sumber: Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Selatan

## 1.2 Perumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menfokuskan pada efektivitas pemanfaatan program BOS yang dicanangkan oleh pemerintah, dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Pesanggrahan, sehingga permasalahan pokok yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan program BOS dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program BOS di Kecamatan Pesanggrahan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Prinsip utama dari pelaksanaan program BOS ini adalah bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu, tidak merasa terbebani lagi untuk menyekolahkan anak-anaknya. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas, mengenai sejauh mana efektivitas program BOS di Kecamatan Pesanggrahan, apakah telah mampu mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga penulis dapat:

Universitas Indonesia

1. Menganalisis sejauhmana efektivitas pemanfaatan program BOS yang telah digulirkan oleh pemerintah, mampu meningkatkan mutu pendidikan dasar 9 tahun;
2. Menganalisis apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program BOS.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulisan tesis ini bermaksud memberikan manfaat penelitian secara akademis, sosial dan praktis.

##### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis berupaya memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia akademik umumnya mengenai pemahaman tentang program pemerintah di bidang pendidikan, khususnya program pemberian dana BOS yang saat ini telah memasuki tahap akhir.

##### **2. Manfaat Sosial**

Manfaat praktis berupaya memberikan gambaran tentang pelaksanaan program pemberian dana BOS, khususnya di Kecamatan Pesanggrahan, kepada masyarakat agar lebih paham sekaligus dapat mengawasi bentuk pelaksanaan program pemberian dana BOS.

##### **3. Manfaat Praktis**

Manfaat penulisan ini adalah berupaya memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kecamatan Pesanggrahan dalam mengelola pelaksanaan program pemberian dana BOS sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal serta dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki penulis, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada:

1. Pendidikan dasar dalam penulisan ini adalah penyelenggara jenjang pendidikan dasar 9 tahun yaitu SD dan SMP Negeri dengan kriteria Sekolah Standar Nasional (SSN) dan sekolah potensial;
2. Efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada ketercapaian tujuan program BOS yang telah ditetapkan;
3. Peningkatan mutu yang dikaji dalam penelitian ini adalah tingkat pendaftaran siswa, angka putus sekolah, tingkat kelulusan dan prestasi akademis siswa.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi yang disajikan, maka penulis menyajikan tesis ini dalam lima bab yang saling terkait, yaitu:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan tinjauan awal sebagai pengantar pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Pendahuluan ini berisi tentang : *Latar Belakang*, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian dan Sistematika Penulisan. Dalam *Latar Belakang Masalah*, penulis mencoba memaparkan hal-hal apa saja yang melatarbelakangi penulis dalam mengambil tema penelitian, yakni mengenai efektivitas program dana BOS yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dalam *Pokok permasalahan*, penulis menggambarkan permasalahan yang ada didalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini, dijelaskan lebih lanjut dalam *Tujuan Penelitian*, begitu juga dengan *Manfaat Penelitian* dan *Batasan Penelitian*.

### **BAB 2 : TINJAUAN LITERATUR**

Bab ini terbagi atas beberapa sub bab, sebagai salah satu referensi untuk karangan ilmiah yang penulis buat. Penulis memberikan teori-teori yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini teori-teori mengenai kebijakan pendidikan, karena program BOS adalah salah satu dari komponen pelaksana kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Mengenai pembiayaan juga dimasukkan, lebih spesifik lagi pembiayaan di bidang pendidikan, bagaimana dana BOS yang diberikan oleh pemerintah mampu menjadi stimulus bagi pemerintah daerah dalam

meningkatkan mutu pendidikan dasar 9 tahun. Teori lain yang dipergunakan adalah teori efektivitas, serta efektivitas program khususnya di bidang pendidikan, subsidi operasional sekolah dan hal-hal lain yang terkait, juga teori mutu pendidikan karena penulis mengambil perspektif efektivitas program BOS dari sudut pandang peningkatan mutu pendidikan. Teori-teori tersebut nantinya akan digunakan oleh penulis sebagai landasan utama dalam pembahasan permasalahan penelitian ini.

### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis mencoba menggambarkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Bab ini akan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis data yang tertuang dalam penelitian, teknik pengumpulan data, penentuan informan sebagai nara sumber dalam penelitian ini, serta analisis terhadap data yang telah terkumpul.

### **BAB 4 : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**

Bab ini membahas mengenai profil lokasi penelitian, Kecamatan Pesanggrahan, termasuk di dalamnya adalah profil sekolah yang diteliti yaitu SDN 10 Pesanggrahan, SDN 14 Bintaro, SMPN 178 dan SMPN 177, serta gambaran program BOS secara keseluruhan.

### **BAB 5 : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PROGRAM BOS DI KECAMATAN PESANGGRAHAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan menjelaskan beberapa analisis yang berkenaan dengan efektivitas program BOS meliputi masukan (*input*), pencapaian proses program BOS, pencapaian hasil (*output*) yang salah satunya meliputi peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, serta konflik-konflik/hambatan-hambatan yang menyertai pelaksanaan program BOS di Kecamatan Pesanggrahan.

**BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran/rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis.

